

## Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelompok Difabel Panti Asuhan Bina Siwi

Natasya Dwi Nurmalita<sup>1</sup>, Ane Permatasari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<sup>2</sup>SDGs Center, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dikirimkan: 30 Juni 2023

Direvisi: 10 Maret 2024

Diterbitkan: 08 Oktober 2024

### INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *collaborative governance* dalam pemberdayaan sosial ekonomi pada kelompok difabel panti asuhan Bina Siwi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan observasi dengan *stakeholder* yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat difabel. Penelitian ini menggunakan delapan indikator *collaborative governance* untuk menganalisis data yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan kelompok difabel panti asuhan Bina Siwi telah mencakup empat aktor, yaitu pemerintah, akademisi, swasta, dan komunitas masyarakat. Meskipun demikian, aktivitas yang dilakukan cenderung tidak berkelanjutan, terutama dari pihak pemerintah kalurahan. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi dalam pemberdayaan difabel panti asuhan Bina Siwi belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan adanya ketimpangan peran dimana kolaborasi dan pemberdayaan lebih dilakukan dan diinisiasi oleh pihak panti asuhan Bina Siwi. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu

### KATA KUNCI

*Collaborative Governance*, Difabel, Pemberdayaan

### Pendahuluan

Kesetaraan adalah proses manusia untuk mendapatkan rasa adil. Mencapai sebuah kesetaraan tidak terlepas dengan permasalahan pada ketimpangan. Untuk mengurangi sebuah ketimpangan dapat dilakukan dengan melihat prinsip Hak Manusia dan dapat diatasi jika mengupayakan kesempatan di berbagai bidang dalam bentuk aksesibilitas fisik maupun non-fisik (M. Arifin & Mahaputra, 2020:167). Berdasarkan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh dan (2) setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak – anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Difabel atau *Differently*

### Korespondensi:

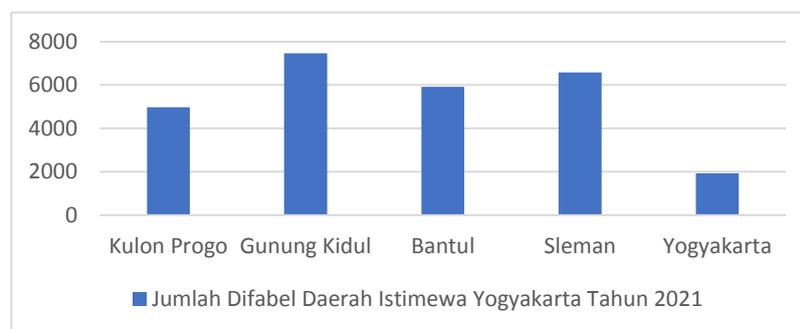
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, 55183.

Email: natasya.dwi.isip19@mail.umy.ac.id

*Abled People* dan biasa dikenal dengan istilah Disabilitas, merupakan seseorang dengan kondisi fisik, mental, intelektual, dan sensorik yang terbatas. Difabel dapat diartikan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik seperti cacat tubuh dari lahir bahkan karena mengidap sebuah penyakit atau musibah kecelakaan (Feminasary, 2016:2). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 penyandang difabel adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama dan memiliki hambatan dalam proses berinteraksi dengan lainnya. Di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa difabel berhak mendapatkan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, aksesibilitas bahkan pelayanan publik (Ghifari Naufal & Atik Septi Winarsih, 2019:3)

Adanya permasalahan terkait dengan ketimpangan dan tidak meratanya hak-hak untuk difabel dapat di atasi dengan sebuah kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud adalah kolaborasi bersama pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan yang setiap tahun sama. *Collaborative governance* dapat diartikan sebagai sebuah cara untuk pembuatan regulasi atau kebijakan dan manajemen publik dengan tujuan serta kepentingan dari semua stakeholder yang terlibat (Ferry Afrisal et al., 2022:1). Selain itu, *collaborative governance* juga berfungsi untuk mengantisipasi potensi kegagalan dalam proses pembangunan, perlu dilakukan tindakan kerjasama dengan lembaga lain untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan yang sama (Duadji & Tresiana, 2018:3). Kesetaraan merupakan aspek penting dalam berjalanya kolaborasi. Dalam bermusyawarah, kolaborasi merupakan bagian untuk menentukan arah kebijakan (Andriani dkk., 2020:152). *Collaborative Governance* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kolaborasi pemerintah Kalurahan Sendangsari dengan para *stakeholder* dalam proses pembangunan tatanan inklusif pada kaum difabel. Salah satu provinsi yang memiliki panti asuhan difabel adalah di Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan pusat perekonomian bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dan menjadi tujuan bagi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Sebanyak enam puluh Difabel pada tahun 2009 telah disalurkan melalui Dinas Sosial Yogyakarta kepada perusahaan dan salah satunya adalah perusahaan jahit di daerah Kota Gede (Dewi, 2015:72-73). Di Yogyakarta terdapat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Grafik 1. Jumlah Difabel Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021



Sumber: <https://dinsos.jogjaprov.go.id/> (diakses 25 September 2022, jam 21:21)

Data pada grafik 1. diatas diperoleh dari Dinas Sosial Provinsi Yogyakarta menyatakan bahwa tahun 2021 terdapat sebanyak 26.866 penyandang difabel di 5

kabupaten. Bentuk kesetaraan pada difabel Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan regulasi Peraturan Daerah Yogyakarta No. 4 tahun 2012 tentang Pemenuhan pada hak-hak difabel. Peraturan tersebut mengatur terkait dengan aksesibilitas publik, pendidikan, ketenagakerjaan hingga kesempatan mendapatkan permodalan usaha. Jumlah difabel tertinggi terdapat di wilayah Kabupaten Gunung Kidul dengan jumlah 7.472 orang. Jumlah tertinggi kedua dari Kabupaten Sleman dengan jumlah 6.579, selanjutnya dari Kabupaten Bantul yaitu 5.912 dan terakhir adalah dari Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah 4.971 dan terendah adalah Kota Yogyakarta yaitu 1.932. Data tersebut merupakan persebaran difabel pada 5 kabupaten. Terutama Kabupaten Bantul yang dipilih oleh peneliti menjadi tempat penelitian dan menjadi kabupaten ketiga setelah Gunung Kidul dan Sleman dengan jumlah Difabel yang sangat banyak. Sehingga pemerintah Kabupaten Bantul meluncurkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang difabel. Di Kabupaten Bantul terdapat Panti Asuhan Bina Siwi khusus difabel bertempat di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Sikap mandiri harus dimiliki semua orang begitu juga difabel, supaya pandangan orang lain dan rasa terabaikan tidak menjadi masalah utama difabel atas hak-haknya (Afriany & Hakim, 2018:59). Seperti upaya dalam pemberdayaan difabel dilakukan di Panti Asuhan Bina Siwi melalui kerjasama dengan banyak stakeholder. *Collaborative Governance* ini dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan proses pemberdayaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis proses *Collaborative governance* dan pemberdayaan yang telah terjalin dengan bantuan para stakeholder dalam berbagai bentuk. Yang membedakan dari penelitian-penelitian sebelumnya, seperti menurut penelitian (Wirawan et al., 2022) dan (S. Arifin & Dewi, 2018) dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa para *stakeholder* masih belum berperan aktif sehingga pemberdayaan yang dilakukan belum maksimal dan tidak memiliki hasil akhir yang berkelanjutan. Pada penelitian ini akan cenderung membahas adakah kolaborasi yang dijalankan oleh pihak Kalurahan Sendangsari sebagai pemberi wakaf tanah untuk pembangunan panti asuhan dalam melakukan pemberdayaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi difabel. Maka penulisan ini akan membahas terkait dengan bagaimana proses *collaborative governance* pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan sosial ekonomi pada kelompok difabel di panti asuhan bina siwi, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan kolaborasi dan difabel dapat dibentuk sebuah kebaruan pada penelitian ini yakni berfokus pada proses pemberdayaan yang tidak hanya berlandaskan pada sosial saja tetapi ekonomi yang mengarah untuk profitabilitas difabel dengan proses *collaborative governance* sehingga difabel lebih mandiri dan memiliki pekerjaan untuk kesejahteraan hidupnya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam memberikan pengetahuan pengembangan ilmu pemerintahan untuk dapat berkontribusi dalam aksi sosial secara langsung kepada masyarakat berupa pemberdayaan khususnya kepada difabel supaya lebih terbuka dengan isu difabel.

Desain Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana jalannya implementasi *collaborative governance* dalam pemberdayaan sosial ekonomi pada kelompok difabel di Panti

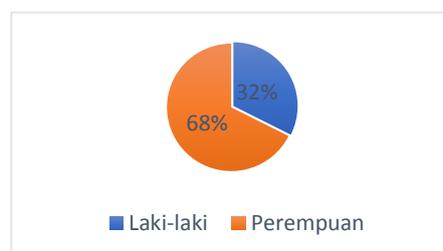
Asuhan Bina Siwi, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilaksanakan di Panti Asuhan Bina Siwi, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Proses pengambilan data yang dilakukan selama satu bulan. Perolehan data dari hasil wawancara dan observasi pada Maret hingga Juni 2023. Informan Kepala Kalurahan yaitu Bapak Durori S.Pd, M.Pd., ketua panti asuhan Bina Siwi yaitu Bu Jumilah dan Pak Sugiman, pengasuh panti asuhan yaitu Pak Anto, pendamping jahit yaitu Mbak Suwanti dan difabel yaitu Gatik dan Fauzi serta Flora perwakilan Mahasiswa Pendidikan Luar Biasa UNY dan Rita dari divisi pemberdayaan dan produksi Inlue Indonesia. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan hasil yang mendalam dan sesuai antar *stakeholder*. Kesesuaian konsep wawancara untuk mengetahui menganalisa hasil *collaborative governance* dan proses pemberdayaan pada panti asuhan bina siwi. Penelitian ini menggunakan model *collaborative governance* dari teori DeSeve yang terdiri dari delapan indikator yaitu *Network Structure, Commitment to a common purposes, Trust among the participants, Governance, Acces to Authority, Distributive Accountability atau Responsibility, Information Sharing, dan Acces to Resources*

## Pembahasan

### **Collaborative Governance dalam proses pemberdayaan sosial ekonomi di Panti Asuhan Bina Siwi, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.**

*Collaborative governance* merupakan sebuah cara dalam memberikan solusi dari permasalahan sosial yang belum dapat terselesaikan dengan baik oleh para pemangku kepentingan (Fatimah et al., 2021:295). Sesuai dengan konsep penelitian ini untuk mengetahui secara lebih detail terkait dengan *collaborative governance* yang dilakukan oleh pemerintah, akademisi, kelompok masyarakat dan pelaku usaha dalam proses pemberdayaan sosial ekonomi kelompok difabel di Panti Asuhan Bina Siwi, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Panti Asuhan Bina Siwi merupakan panti asuhan swasta dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) milik masyarakat Kalurahan Sendangsari yang berada di bawah naungan Yayasan Ngudiharjo. Yayasan ini mendapatkan izin dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan berdasarkan Akta Notaris No. 003 pada tanggal 14 Desember 1999, namun Panti Asuhan ini beroperasi sejak tahun 1993 dan mengelola SLB serta layanan Orang Jompo atau Lansia.

Bagan 1. Jumlah Difabel Panti Asuhan Bina Siwi



Sumber: data panti asuhan bina siwi

Dari bagan diatas dapat disimpulkan bahwa difabel di Bina Siwi berjumlah 37 orang dengan laki-laki berjumlah 12 orang dan perempuan berjumlah 25 orang. Mayoritas karakteristik yaitu difabel Tuna Grahita karakteristik ringan, sedang, dan

berat, dan tuna daksa. Kegiatan kolaborasi dilakukan diantaranya oleh pemerintah, akademisi, kelompok masyarakat dan pelaku usaha dengan Panti Asuhan Bina Siwi. Namun, pihak panti asuhan Bina Siwi yang lebih mendominasi perannya dalam proses kolaborasi. Jika dilihat dengan perspektif *collaborative governance* diharapkan pemerintah kalurahan Sendangsari yang seharusnya memegang kendali atas jalannya kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* dan juga ikut andil dalam proses pemberdayaan difabel. Untuk melihat sejauh mana kolaborasi yang telah dilakukan maka penulis menganalisis dengan menggunakan indikator yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan kolaborasi dan terdapat delapan indikator yang telah dipaparkan oleh Deseve (2007) yaitu:

1. Tipe *Networked Structure* (jenis struktur jaringan)

Prinsip *Networked Structure* harus bersifat sebaik mungkin artinya tidak boleh ada monopoli dan kekuasaan karena memiliki keefektifan serta jaringan juga tidak boleh membentuk hirarki dan ditekankan pada satu elemen kekuasaan. Seharusnya berbentuk asli dan teroganisir (Rahmawati et al., 2021:46). Pemerintah Kalurahan Sendangsari melakukan kolaborasi dengan pihak Panti Asuhan Bina Siwi tidak didasari pada satu kekuasaan tetapi proses kolaborasi yang terbuka dan para *stakeholder* memiliki hak, tanggung jawab serta kewajiban masing-masing dalam pemenuhan proses pemberdayaan difabel dibidang sosial dan ekonomi. Proses terbentuknya kolaborasi untuk membentuk pemberdayaan pada teman-teman difabel di Bina Siwi. Berawal dari banyaknya difabel yang ada di Kalurahan Sendangsari maka salah satu warga bernama Ibu Jumilah menginisiasi untuk membentuk desa yang ramah difabel melalui proses musyawarah bersama warga kalurahan. Dalam proses musyawarah untuk menentukan keputusan yang terbaik melalui banyak penolakan dari beberapa masyarakat yang sulit dalam menerima keberadaan difabel. Inisiasi pemberian wakaf dapat disetujui oleh pemerintah Kalurahan Sendangsari.

Setelah keputusan final maka pihak Kalurahan Sendangsari memberikan wakaf tanah untuk dibangun panti atas musyawarah bersama dengan Surat Keputusan Tanah LMD, BPD No 02/KD/XI/2000. Namun dalam proses kolaborasi berkelanjutan pihak kalurahan tidak memegang kendali utama dalam melaksanakan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*, hanya sebagai perantara dalam bidang kesenian dengan Dinas Kebudayaan atau institusi terkait bila mana terdapat undangan untuk melakukan pentas seni. dikarenakan difabel di Bina Siwi memiliki keahlian dalam bermain gamelan, angklung dan menyanyikan lagu jawa. Maka, pihak kalurahan mengundang Panti Asuhan Bina Siwi sebagai perwakilan atas nama desa. Pihak Kalurahan Sendangsari merasa bahwa tidak dapat ikut ambil kendali dalam proses pemberdayaan dikarenakan panti asuhan sudah dibawah naungan Dinas Sosial. Kegiatan tersebut juga berguna untuk kelangsungan hidup teman-teman difabel karena dengan bakat tersebut mereka mendapatkan banyak undangan untuk mengikuti pentas seni di berbagai acara bahkan hingga luar kota. Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam hal ini berperan memberikan fasilitas menjahit berupa mesin jahit pada tanggal 02 November 2021 berjumlah 5 unit. Dalam prosesnya pihak panti Asuhan Bina Siwi membuat proposal untuk diajukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Fasilitas alat mesin jahit digunakan hingga sekarang oleh panti asuhan Bina Siwi untuk pembuatan produk seperti daster, gamis, kaos dan tas.

Akademisi merupakan bagian dari proses kolaborasi untuk memberikan pemberdayaan bagi kelompok difabel di panti asuhan Bina Siwi. Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Pendidikan Luar Biasa dan SMK Nasional Bantul jurusan Keperawatan Sosial menjadi akademisi untuk kegiatan magang. Kegiatan magang ini dilakukan selama tiga bulan dengan rentang waktu pada 5 Mei hingga 3 Juli 2023. Kelompok masyarakat yang memiliki komitmen dalam proses kolaborasi sosial dan ekonomi untuk keberlangsungan hidup difabel adalah Inlue Indonesia yang merupakan startup yang bergerak pada bidang pemberdayaan difabel pada Agustus 2022 hingga sekarang. Inlue Indonesia memiliki peran untuk memberikan pelatihan, mengawasi jalannya produksi, memberikan ide terkait produk baru hingga pemasaran. Hasil penjualan atau pemasaran dilakukan dengan *fairtrade* sesuai keputusan kedua belah pihak. Pelaku usaha dalam proses kolaborasi yang dilakukan oleh panti asuhan Bina Siwi adalah PT Ameya. PT Ameya adalah perusahaan yang bergerak dibidang garment. Berawal dari pihak panti asuhan Bina Siwi yang mengajukan proposal terkait pengajuan untuk dapat menyumbangkan sisa kain jahitan dari pabrik tersebut sehingga dapat dibuat produk daur ulang ramah lingkungan yaitu keset.

## 2. *Commitment to a Common Purpose* (komitmen terhadap tujuan)

Setiap kolaborasi tidak pernah terlepas dari peran masing-masing *stakeholder* untuk membentuk pola perwujudan peran sehingga dapat membentuk tatanan dari sebuah tujuan yang baik sebagai upaya untuk memberikan hasil kolaborasi yang baik. Peran yang dimiliki oleh para *stakeholder* baik peran kecil atau besar akan membuahkan hasil yang baik. Perlu adanya sebuah komitmen untuk menuju solusi terbaik. Komitmen pada sebuah proses yaitu membangun keyakinan bahwa musyawarah merupakan cara terbaik untuk dapat mencapai sebuah regulasi bersama, sebuah prosedur harus bersifat transparan, jelas dan adil (Solikhin & Rahaju, 2019:4). Pemerintah Kalurahan Sendangsari memiliki komitmen dalam menyukseskan kegiatan difabel di bidang kesenian dengan memberikan fasilitas NIK atau Nomor Induk Kesenian untuk menunjang kemampuan para difabel dalam melestarikan kebudayaan yaitu Nomor Induk Kesenian atau (NIK) sebagai berikut: Paguyuban Seni Angklung “*Bambu Laras*” NIK 091/14/2021, Paguyuban Seni Hadroh “*Sholawat Nabi Sembada*” NIK 089/08/2021, Paguyuban Seni Karawitan “*Ngudi Laras*” NIK 088/04/2021, Paguyuban Seni Musik “*Pabsi Band*” NIK 090/12/2021. Dengan adanya fasilitas tersebut dapat membantu difabel di Bina Siwi untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas. Hingga pada tahun 2023 difabel banyak mendapatkan undangan untuk tampil bermain gamelan, angklung, hadroh dan musik. Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam proses kolaborasi ini tidak memiliki komitmen lebih banyak. Namun jika pihak panti asuhan Bina Siwi membutuhkan fasilitas untuk menunjang proses pemberdayaan difabel maka dapat mengajukan proposal yang akan diterima dengan terbuka oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Di tinjau dari sisi akademisi pihak mahasiswa UNY S-1 jurusan Pendidikan Luar Biasa memiliki komitmen untuk melakukan pemberdayaan sosial melalui program-program yang telah diagendakan selama 3 bulan. Program dari mahasiswa UNY adalah identifikasi dan asesmen, perancangan program individual, pelatihan pembuatan telur asin, pelatihan K3, pelatihan *packaging*, pelatihan membuat buket, pelatihan membuat hampers, pelatihan bina diri, pengembangan *e commerce*,

pengelolaan website, pembukuan penjualan, Sosialisasi dan bazar. Sedangkan program untuk pihak SMK Nasional Bantul yaitu membantu para pengasuh dalam menjaga dan merawat difabel. Ditinjau dari sisi kelompok masyarakat, Inclue Indonesia dalam melakukan kolaborasi dengan panti asuhan Bina Siwi memiliki komitmen untuk terus memberikan inovasi produk sehingga mendapatkan nilai jual. Dalam hal ini pihak Inclue Indonesia merekrut guru jahit sekaligus karyawan dari lulusan SMKN 1 Sewon Jurusan Tata Busana guna mewujudkan inklusivitas dengan mengkolaborasikan difabel dan non difabel. Dalam pembuatan produk tersebut terpilih 6 difabel dari 40 difabel dengan karakteristik tuna grahita sedang yang sudah mahir dalam menjahit, ke enam difabel tersebut dapat menjahit dengan baik sesuai kapasitas skill penjahit pada umumnya. Permasalahannya adalah produk yang mereka buat masih sulit untuk bersaing di pasar karena tidak memiliki competitive advantage dan kurang memiliki nilai jual. Setelah melalui hasil evaluasi dari para pihak Inclue Indonesia dan pengasuh maka difabel di Panti Asuhan Bina Siwi mencoba untuk membuat produk baru. Proses pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya bernilai sosial tetapi juga bernilai ekonomi. Pihak Inclue Indonesia melihat bawa penjualan panti Asuhan Bina Siwi dari bulan ke bulan namun sepi peminat. Dari pengalaman tersebut maka pihak panti asuhan membuat sebuah daster model baru khusus untuk ibu menyusui dan pembuatan produk baru outer atau luaran wanita. Dengan kesepakatan antara Inclue Indonesia dan pengasuh lain menambahkan sebuah value yaitu daster yang dapat mempermudah proses menyusui. Panti Asuhan Bina Siwi menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Dinas sosial Kabupaten Bantul dan para donator untuk pemberdayaan difabel melalui langkah-langkah sebagai berikut:

#### A. Pelatihan Pembuatan Produk Baru

Proses pelatihan pertama melakukan pembuatan sample daster untuk ibu menyusui. Pelatihan di lakukan bersama 6 difabel dengan karakteristik TunaGrahita kategori ringan. Proses pelatihan meliputi beberapa fase dimana teman-teman difabel diajarkan untuk membuat pola awal daster yang selanjutnya diikuti dengan percobaan pemasangan *ritsleting* pada bagian kanan dan kiri dan diakhiri dengan menjahit hasil pemotongan pola sehingga menjadi sampele daster model baru. Berikut adalah dokumentasi pelatihan teman-teman difabel:

Gambar 1. Pelatihan pembuatan produk baru



Sumber: Data Panti Asuhan Bina Siwi

**B. Produksi**

Proses produksi dilakukan setiap hari sebagai kegiatan utama bagi para difabel di Bina Siwi. Bahan – bahan yang digunakan untuk membuat daster di pilih dari bahan tekstil rayon polos dan rayon bermotif yang dinilai menjadi bahan yang nyaman untuk digunakan. Pemilihan bahan menjadi poin utama untuk menjadi nilai tambah pada produk karena bahan tersebut memiliki keunggulan seperti daya serap Keringat tinggi dan adanya sirkulasi udara yang membuat penggunaanya merasa nyaman. Produksi pembuatan daster dilakukan setiap hari oleh 6 orang difabel dan 2 lulusan SMK Jurusan Tata Busana sedangkan 34 teman difabel lainnya menjahit tas atau menganyam keset.

Gambar 2. Proses Menjahit di Panti Asuhan Bina Siwi

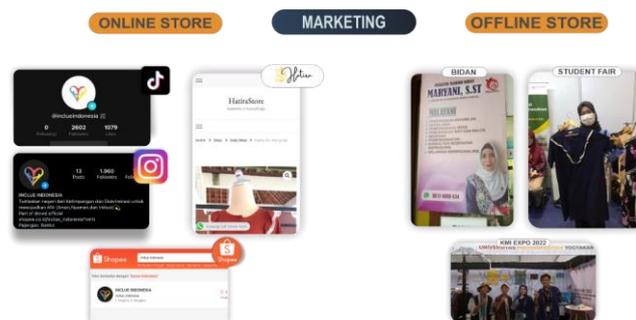


Sumber: data Panti Asuhan Bina Siwi

**C. Penjualan dan Pemasaran**

Proses melakukan penjualan Panti Asuhan Bina Siwi bekerja sama dengan Incline Indonesia sebuah platform yang bergerak pada bidang jasa dan perdagangan. Pada 20 Oktober 2022 Incline Indonesia memberikan pengarahan Panti Asuhan Bina Siwi untuk berkolaborasi dengan lulusan SMK jurusan Tata Busana yaitu kak Wanti sebagai pemegang administrasi penjualan sosial media dan dibantu oleh Incline Indonesia dengan memberikan bagi hasil sebanyak Rp.7000,00/pcs daster untuk profit hasil teman-teman Difabel di Panti Asuhan Bina Siwi. Target dari Incline Indonesia sendiri lebih ke online marketing. Hal ini di karenakan penggunaan media sosial sebagai sarana promosi dirasa lebih efektif, mengingat juga pengguna internet sudah menyeluruh, maka dari itu tingkat keberhasilan dari pemasaran akan sesuai target. Dalam pemasarannya inclue menggunakan platform seperti aplikasi tiktok dan Instagram yang memiliki jadwal tersendiri untuk membuat konten sebanyak 1 kali dalam seminggu dalam pembuatan konten di bantu oleh Tim Incline Indonesia. Dalam hal ini pihak Incline Indonesia juga bekerjasama dengan Paltform UMKM Hatira Store untuk melakukan penjualan melalui website resmi Hatira Store.

Gambar 3 Proses pemasaran Incline Indonesia



Inclue Indonesia juga melakukan pemasaran melalui offline yaitu dengan bekerjasama Bersama Bidan salah satunya adalah Bidan Maryani yang ada di Sedayu, Kabupaten Bantul dan mengikuti Pameran Student Fair pada 20 Oktober 2022 dan KMI Expo 2022 pada 21-25 November 2022. Dengan adanya kedua strategi pemasaran tersebut, dapat berkolaborasi agar pada nantinya pemasaran dari produk inclue akan melesat dan sesuai dengan target. Pihak PT Ameya sebagai pelaku usaha tidak memiliki komitmen lebih dalam memberikan pasokan kain untuk panti asuhan Bina Siwi. Menurut pihak panti asuhan Bina Siwi, pihak PT ameya memberikan pasokan kain terakhir kali adalah beberapa bulan yang lalu dan sudah cukup terbilang lama.

### 3. *Trust Among Participant* (adanya saling percaya antar stakeholder)

Proses adanya rasa saling percaya antar stakeholder menjadi poin utama dalam proses berlangsungnya kolaborasi. Rasa percaya dapat timbul sebagai bentuk tanggung jawab untuk kesepakatan dalam kelanjutan proses kolaborasi. Tanpa memiliki rasa kepercayaan akan sulit bagi stakeholder untuk menjadi mitra dalam menyelesaikan permasalahan. Sikap ini dilakukan oleh pihak Panti Asuhan Bina Siwi kepada para *stakeholder*. Pihak kalurahan yang menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak Panti Asuhan Bina Siwi untuk proses pemberdayaan dan pengembangan skill difabel dengan *output* produk yang akan dijual. Pihak panti asuhan juga memberikan kepercayaan pada pihak kalurahan dalam bidang kesenian. Masyarakat Desa Sendangsari juga menerima dengan rasa percaya keberadaan difabel sehingga ketika terdapat acara-acara desa masyarakat menyambut dengan baik. Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan panti asuhan bina siwi saling memberikan kepercayaan satu sama lain sebagai perwujudan proses kolaborasi. Dengan rasa percaya tersebut pihak panti percaya akan banyak dibantu oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Begitupun dengan pihak Dinas Sosial percaya bahwa bantuan fasilitas akan digunakan sebaik mungkin.

Dari sisi akademisi pihak Panti asuhan Bina Siwi memberikan kepercayaan pada pihak mahasiswa UNY dan siswa SMK Nasional untuk dapat membantu perkembangan dan pelatihan bagi teman-teman difabel. Dari sisi kelompok masyarakat, Inclue Indonesia dengan pihak panti asuhan Bina Siwi saling memberikan kepercayaan dengan sikap transparan dari hasil produk yang telah terjual, pemasukan dan pengeluaran yang digunakan untuk pembuatan produk. Ditinjau dari pelaku usaha PT Ameya memberikan kepercayaan kepada pihak panti asuhan Bina Siwi untuk dapat memanfaatkan hasil sisa kain jahitan dari pabrik dengan didaur ulang sebagai produk baru.

### 4. *Governance*

*Governance* dapat meliputi sebuah batas-batas untuk mengetahui siapa yang dapat terlibat dengan keputusan kerja yang jelas dan sesuai kesepakatan bersama. Sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa tidak adanya *Memorandum of Understanding* (MOU) untuk proses kolaborasi pada pemerintah Kalurahan Sendangsari, Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan PT Ameya. Sedangkan untuk UNY, SMK Nasional Bantul dan Inclue Indonesia terdapat *Memorandum of Understanding* (MOU) untuk proses kolaborasi yang dilakukan oleh pihak UNY dan SMK Nasional Bantul sebagai bentuk tanggung jawab selama 3 bulan proses magang.

5. *Access to Authority* (akses terhadap otoritas)

Akses terhadap otoritas merupakan adanya ukuran-ukuran prosedur yang jelas dan dapat diterima secara luas. Proses kolaborasi ini dari pihak pemerintah Kalurahan, Dinas Sosial Kabupaten Bantul, akademisi UNY dan SMK Nasional Bantul, kelompok masyarakat yaitu Inlue Indonesia dan PT Ameya memiliki otoritas sendiri dalam melakukan kolaborasi sesuai dengan tujuan dan kesepakatan masing-masing dengan pihak Panti Asuhan Bina Siwi.

6. *Distributive Accountability and Responsibility* (Pembagian Akuntabilitas dan Responsibilitas)

Proses kolaborasi juga memerlukan proses dalam pembagian akuntabilitas dan responibilitas yang digunakan untuk melakukan sebuah forum untuk menjalin komunikasi dan diadakan sebuah agenda rutin untuk melakukan evaluasi atau mengadakan rapat dengan agenda tertentu. Hal ini dilakukan oleh internal yaitu pengasuh dan juga difabel itu sendiri namun tidak ada jadwal tertentu secara rutin. Sedangkan untuk pemerintah kalurahan Sendangsari bersifat insidental atau jika diperlukan saja untuk datang tidak memiliki jadwal tertentu. Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki agenda rutin rapat satu bulan sekali untuk pemberian informasi dan monitoring serta evaluasi. Dari sisi akademis rapat dilakukan secara personal dengan masing-masing tim, rapat bersama pengasuh hanya ketika dibutuhkan saja. Sedangkan untuk proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Inlue Indonesia sebagai kegiatan rutin dari teman-teman difabel di Panti Asuhan Bina Siwi adalah menjahit, menyablon, dan menganyam serta latihan gamelan. Sedangkan rapat secara internal antara pengasuh panti diadakan secara rutin dalam waktu seminggu 2 sampai 3 kali untuk mengetahui bagaimana kondisi dan kegiatan difabel.

7. *Information Sharing* (Penyampaian Informasi)

Sistem penyampaian informasi dalam melakukan kolaborasi ini terjadi tidak menyeluruh dari para stakeholder. Penyampaian informasi ini belum dapat terjadi dengan baik dikarenakan baik Pemerintah Kalurahan Sendangsari dan pihak Panti Asuhan Bina Siwi masih kurang dalam menjalin komunikasi untuk penyampaian proses kolaborasi pemberdayaan difabel dengan alasan dikarenakan tidak memiliki perjanjian terikat, tidak memiliki catatan keuangan yang sesuai dari hasil produk yang telah terjual, dan tidak memiliki informasi yang sesuai antar pengasuh di Bina Siwi dalam penyampaian informasi sehingga sering terjadi kesalahpahaman antar pengasuh.

8. *Acces to resources* (Akses terhadap sumberdaya)

Akses terhadap sumberdaya merupakan ketersediaan secara finansial, peralatan, dan manusia yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam proses kolaborasi ini secara sumberdaya dapat dikatakan cukup terlihat dari sumber daya manusia yang dapat membantu dalam proses kerja pembuatan produk difabel yaitu 2 orang lulusan SMK tata busana yang setiap harinya membimbing serta memberikan materi terkait hasil produk yang siap untuk di pasarkan. Dalam segi peralatan sangat memadai dan terdapat banyak mesin jahit dan alat sablon sebagai fasilitas penunjang. Dari segi finansial Inlue Indonesia terbuka dan membagi hasil sesuai dengan keputusan kedua belah pihak selain itu hasil diputar kan dari pemberian dana donatur untuk keberlanjutan pemberdayaan dibidang menjahit dengan pembuatan produk.

Produk yang dibuat setiap harinya hanya 1-3 produk kecuali jika mendapatkan pesanan lebih.

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan *collaborative governance* Kalurahan Sendangsari dengan kelompok difabel dan analisa proses pemberdayaan kelompok difabel di Panti Asuhan Bina Siwi maka dapat disimpulkan menurut *Networked Structure*, Para *stakeholder* membangun kolaborasi sesuai dengan tujuan masing-masing secara mandiritanpa ada gabungan satu sama lain dengan ini dapat dikatakan bahwa struktur jaringan belum dapat dilaksanakan dengan baik. *Commitment to a common purpose*, Dalam proses kolaborasi ini masing- masing dari pihak *stakeholder* sudah memiliki komitmen yang jelas langsung dengan para pihak Panti Asuhan Bina Siwi. *Trust among the participant*, proses kolaborasi yang dilakukan oleh Panti Asuhan Bina Siwi memiliki rasa kepercayaan masing- masing sesuai dengan tujuan dan kesepakatan bersama tetapi tidak ada kepercayaan yang terikat antar *stakeholder*. *Governance*, kolaborasi yang dilakukan beberapa memiliki Memorandum of Understanding seperti dari pihak Mahasiswa UNY, Inlue Indonesia, dan Dinas Sosial Kabupaten Bantul, namun dari pihak pemerintah kalurahan sendangsari dan PT Ameya tidak memiliki perjanjian tersebut. *Acces to authority*, proses kolaborasi pada setiap *stakeholder* sudah memiliki otoritas yang jelas. Masing - masing *stakeholder* baik dari pihak pemerintah Kalurahan Sendangsari, Dinas Sosial Kabupaten Bantul serta pihak swasta PT Ameya memiliki otoritas sendiri dalam melakukan kolaborasi sesuai dengan tujuan dan kesepakatan masing-masing dengan pihak Panti Asuhan Bina Siwi sehingga memiliki peran sendiri. *Descriptive accountability/responbility*, kolaborasi pada setiap *stakeholder* memiliki pembinaan dan pemberdayaan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tidak ada keterkaitan antar *stakeholder* dalam melakukan pemberdayaan.

Komunikasi sebagai bentuk tanggung jawab antar *stakeholder* dengan dibentuk forum untuk menjalin komunikasi diadakan dengan jadwal tertentu. *Information Sharing*, penyampaian informasi ini belum dapat terjadi dengan baik dikarenakan baik Pemerintah Desa Sendangsari atau pihak Panti Asuhan Bina Siwi masih kurang dalam menjalin komunikasi untuk penyampaian proses kolaborasi pemberdayaan difabel dengan alasan dikarenakan tidak memiliki perjanjian terikat, tidak memiliki catatan keuangan yang sesuai dari hasil pada setiap pementasan kesenian, hasil produk yang telah terjual, dan tidak memiliki informasi yang sesuai antar pengasuh di Bina Siwi dalam penyampaian informasi sehinggasesering terjadi kesalahpahaman antar pengasuh. *Access to resources*, proses kolaborasi ini secara sumberdaya dapat dikatakan cukup terlihat dari sumber daya manusia yang dapat membantu dalam proses kerja pembuatan produk difabel sedangkan segi keuangan untuk proses pembuatan produk dibantu oleh komunitas Inlue Indonesia. Dalam segi peralatan banyak para donatur dan pihak Dinas Sosial kabupaten Bantul yang membantu memberikan mesin jahit. Ditinjau dari delapan indikator diatas peran pemerintah masih pasif dan cenderung tidak ada, proses kolaborasi sepenuhnya dilakukan oleh pihak panti asuhan Bina Siwi yang bekerjasama dengan *stakeholder*. Seharusnya pemerintah yang mendominasi dan menjalankan proses kolaborasi dengan para *stakeholder* untuk bersinergi mewujudkan inklusivitas.

## Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada pihak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian terkait pelaksanaan *Collaborative Governance*. Tidak lupa Kepada pihak Panti Asuhan Bina Siwi, serta pihak-pihak lain yang tak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah membantu kelancaran penelitian ini serta bersedia memberikan informasi-informasi secara jelas.

## Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka

- Afriany, J., & Hakim, A. (2018). *Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus Pada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Dalam Upaya Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Disabilitas Di Kabupaten Deli Serdang)*. <http://seminar-id.com/semnas-sensasi2018.htmlPage|57>
- Arifin, M., & Mahaputra, W. (2020). *Inovasi Limbah Jahe Menjadi Hand Sanitizer Oleh Kelompok Sahabat Difabel Jepara Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Program CSR Pt Pln Unit Induk Tanjung Jati B*. <http://jpk.jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id>
- Arifin, S., & Dewi, U. (2018). *Collaborative Governance Dalam Program Rintisan Desa Inklusif Di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman*.
- Dewi, U. (2015). Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pekerjaan Di Kota Yogyakarta. In *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara* (Vol. 67). <https://kemsos.go.id/2015>
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2018). Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2201>
- Fatimah, P., Mahsyar, A., & Kasmad, R. (2021). *Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kabupaten Wajo*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Feminasary, D. R. (2016). *Implementasi Program Pelatihan Kerja Terhadap Peningkatan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2016 (Studi Kasus Di Panti Asuhan Bina Siwi Desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul)*.
- Ferry Afrisal, A., Thahir Haning, M., Akmal Ibrahim, M., & Yunus, M. (2022). *Collaborative Governance Dalam Pembuatan Kebijakan* (Vol. 11, Issue 5).
- Ghifari Naufal, & Atik Septi Winarsih, D. (2019). Kualitas Pelayanan Sim Bagi Penyandang Disabilitas Di Polres Bantul Tahun 2018-2019. <Http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/35589/Jurnal%20naufal.Pdf?Sequence=10&isAllowed=y, 04, 1-16>. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi>
- [Sudarmo. \(2011\). Isu-isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance.Surakarta: Smart Media](#)
- Wirawan, R., Afni, I. N., & Winarni, L. (2022). Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas di Desa Maron Kecamatan Garung

Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), 137–143.  
<https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.857>

### Daftar Narasumber

Durori S, Pd.I. M, Pd, Kepala Kalurahan Sendangsari, 1 Maret 2023, pukul 12.30 WIB.  
Jumilah, Ketua Panti Asuhan Bina Siwi, 2 Maret 2023, pukul 08.00 WIB.  
Anto, Pengasuh Panti Asuhan Bina Siwi, 2 Maret 2023, pukul 10.00 WIB.  
Wanti, Pendamping Jahit Panti Asuhan Bina Siwi, 3 Maret 2023, pukul 08.00 WIB.  
Fauzi, Difabel Panti Asuhan Bina Siwi, 3 Maret 2023, pukul 10.00 WIB.  
Flora, Mahasiswi PLB UNY, 20 Juni 2023, pukul 12.00 WIB.  
Rita, Divisi Pemberdayaan dan Produksi Inclusive Indonesia, 21 Juni 2023, pukul 08.00 WIB.

### Tentang Penulis

**Natasya Dwi Nurmalita** adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis memiliki area riset seputar tema difabel dan pemberdayaan.

**Ane Permatasari** adalah dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis memiliki area riset seputar gender, tata kelola kolaborasi, dan kebijakan publik.